

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Hosnan
NIM S20153017
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2022**

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

HOSNAN
NIM: S20153017

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1012

PENGESAHAN

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Desember 2022

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NUP. 201907177

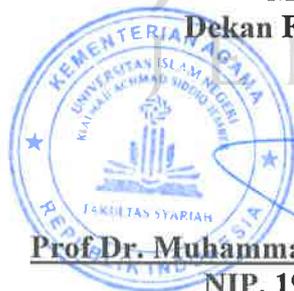
Anggota

1. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ



Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali"(Q.S. Al-Baqoroh : 126)¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Lajnah Pantashihah*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 14.

PERSEMBAHAN

Ahamdulah puji syukur atas karunia Allah SWT. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun dalam proses perjalanan menyelesaikannya banyak rintangan yang datang dari diri kami sendiri seperti rasa malas dan enggan untuk menyelesaikannya, namu daripada itu banyak orang-orang disekitar yang membngkitkan semangat untuk menyelesaikan Skripsi tersebut. Persembahan ini kami sampaikan kepada yang terkasih niat dan tulus yang berasal dari lubuk hati yang terdalam untuk:

1. Kedua orang tua saya, terutama Ibu saya alm. Maryatun dan Bapak saya toharjo yang selalu memberikan do'a-do'a terbaiknya yang senantiasa mengiringi langkah saya dalam menuntut ilmu, kasih dan sayangnnya bak air dilautan kalaupun dijadikan tinta maka tak cukup untuk menuliskannya., semangat dan dukungan yang selalu terucap dari mereka menjadikan saya untuk lebih baik lagi setiap harinya juga tak lupa yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan studi perkuliahan ini.
2. Uti Nisa, Kakak Naimah dan Adik saya yang selalu tak ada hentinya untuk mengingatkan saya dan juga mendo'akan yang terbaik dari yang baik selalu menyertai saya.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji kepada Allah SWT. Kami haturkan kepada-NYA karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat melaksanakan, mengerjakan dan menyelesaikan skripsi tersebut sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari beberapa pihak yang membantu mendoakan dan mendukung serta mendorong agar skripsi tersebut bisa terselesaikan. Maka daripada itu kami tulus mengucapkan salam hormat dan ta'dzim kepada:

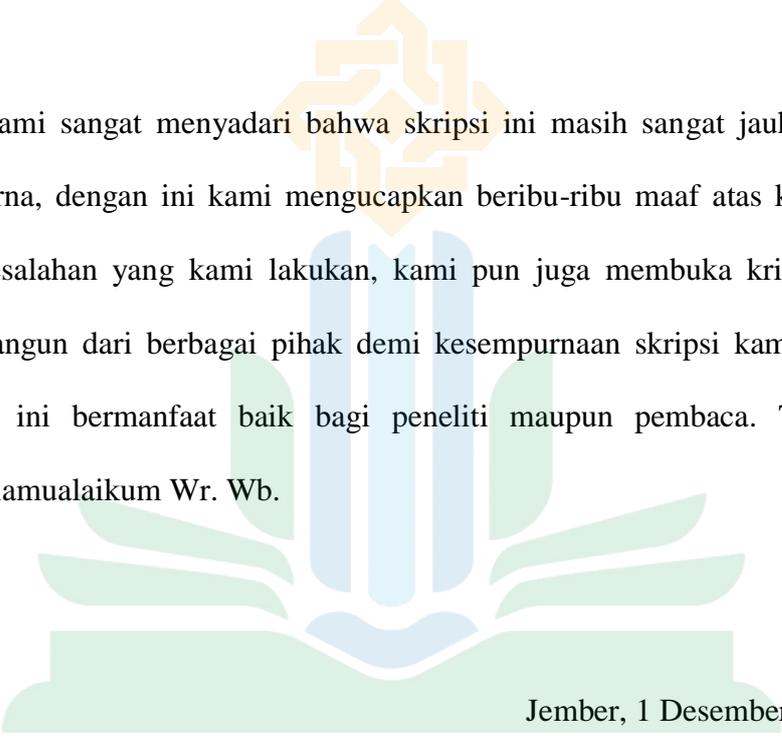
1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Nor Harisudin, M. Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memberikan support dan mengarahkan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen Pembimbing yang telah mengajar dan mendidik penulis dari awal studi hingga akhir selama peneliti menyelesaikan studi.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengelola administrasi keuangan dengan baik demi menunjang kesejahteraan dosen dan penunjang akademik lainnya.

5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membina peningkatan kualitas peneliti selama menjadi mahasiswa.
6. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan dan mengarahkan serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan kepada kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak Dr. H. Roni Subhan, S. Pd., M. Pd., selaku Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan ruang baca yang baik bagi peneliti.
9. Tim penguji Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Bapak Ahmad Faris Widjan, S.H., M.H Bapak Dr. Khoirul Faidzin, M. Ag dan Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag yang telah menguji, memberi kritik dan masukan untuk perbaikan skripsi peneliti.
10. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berdedikasi menjadi teladan yang baik bagi peneliti.
11. Bapak dan Ibu di tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu kewajiban keadministrasian selama menempuh pendidikan.
12. Dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember.

13. Pengurus Himpunan mahasiswa Islam, terimakasih saya sampaikan yang tak ada batas yang telah mewedahi saya untuk mengembangkan sekel.
14. Pimpinan BPS Jember yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian.

Terimakasih kasih saya ucapkan kepada semuanya, semoga semua kebaikan diterima di sisi-NYA dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Kami sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dengan ini kami mengucapkan beribu-ribu maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, kami pun juga membuka kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi kami. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi peneliti maupun pembaca. Terimakasih Wassalamualaikum Wr. Wb.



Jember, 1 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HOSNAN
NIM : S20153017

ABSTRAK

Hosnan, 2022: *Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Kata Kunci: peranan pemerintah, Pembangunan, Sumber Daya Manusia.

Ada beberapa fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak program pemerintah yang berkaitan dengan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang masih tidak signifikan untuk menunjang kualitas masyarakat sehingga pengembangan kualitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik masih kurang, seperti misalnya pendidikan yang masih kurang merata di berbagai kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Jember, begitupun dengan angka kesehatan yang masih sisa 30 persen masyarakat yang tidak memahami bahwa sehat itu merupakan salah satu penunjang untuk terciptanya lingkungan yang berkualitas, yang terakhir poin pada kehidupan yang layak, masih banyak masyarakat yang ketimpangannya jauh ada si kaya dan si miskin.

Fokus penelitian dalam Skripsi ini adalah: 1.) Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 2) Bagaimana peranan pemerintah kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perolehan data sekunder berasal dari dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data. Selanjutnya, analisis informasi menggunakan model Miles, Humberman dan saldana yaitu mereduksi data yang ada, disajikan, dan diverifikasi sebagai simpulan serta rumusan masalah dalam tinjauan penelitian ini dapat terjawab.

Penelitian ini samapai pada simpulan bahwa 1) peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jember masih dirasa kurang melihat bahwa pada kenyatannya banyak sektor-sektor yang masih tidak merata seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak tiga hal inilah yang membuat masyarakat jember masih menjadi salah satu tingkat indeks Pembangunan Manusia paling rendah di Jawa Timur. 2) pemerintahan Kabupaten Jember belum bisa melaksanakan secara utuh amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam isinya menitikkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan masyarakatnya dalam dua garis besar yaitu secara konkuren dan pilihan, artinya pemerintah Kabupaten Jember masih belum bisa mengelola secara utuh apa yang menjadi amanahnya.

DAFTAR ISI

Judul Penelitian	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Analisis Data	28
F. Keabsahan Data.....	30
G. Tahap-Tahap Penelitian	31
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	33
A. Gambaran Objek Penelitian	33

B. Penyajian Data dan Analisis.....	34
C. Pembahasan Temuan.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran-Lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Harapan Hidup	39
Tabel 4.2 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru sesuai jenjang.....	44
Tabel 4. 3 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Jember 2016-2021	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Presentase penduduk yang mengalami keluhan dan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.....	41
Gambar 4.2 Jumlah fasilitas kesehatan Jember.....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang sangat padat dan ramai dilihat dari kehidupannya seakan tak memiliki masalah terkait pengelolaan sumber daya manusianya secara teori umum mungkin pernyataan ini benar namun ketika berbicara Jember secara menyeluruh tidak berfokus pada pusat kota maka mungkin akan terjawab apa saja sebenarnya yang di hadapi pemerintahan kabupaten Jember dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemerintah.

Apakah masyarakat Jember yang jumlahnya mencapai 2,7 juta sudah mendapatkan yang namanya kesejahteraan atau masih kurang dan atau bahkan di bawah 50 persen, menjadi menarik membahas Jember karena berbicara kesenjangan diantara masyarakat yang hidupnya di pusat kota dan di pinggir kota secara pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah serin kali masih tidak sama secara kesejahteraan padahal amanah undang-undang tidak membedakan apakah itu masyarakat yang hidup di pusat kota atau di pinggir kota.

Undang-undang No 23 tahun 2014 menyampaikan dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 bahwa pemerintah pemerintahan memiliki dua kinerja secara umum yaitu urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan wajib, bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Dan di pasal 12 undang-undang yang sama menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki tugas wajib di wilayah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan pemukiman,

ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan sosial². Maka sesuai pasal 11 dan 12 pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan dan mencerdaskan anak bangsa sesuai bahasa yaitu pendidikan dan juga memiliki tanggung jawab di wilayah kesehatan dan kehidupan yang layak berupa ketentraman dan tersedianya pemukiman.

Menjadi tugas bersama untuk membenahi dan memperbaiki yang kurang dari apa yang sudah berlalu demikian dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwa angka melek pendidikan di Jember masih dirasa sangat kurang dengan keadaan kabupaten yang sudah bisa dikatan salah satu kabupaten yang menjadi percontohan di wilayah Jawa Timur, angka pendidikan yang kurang bagus ini mengakibatkan SDM yang kurang berkualitas sehingga angka penganggurannya pun juga besar, bahkan masih ada beberapa kecamatan yang masyarakatnya tidak bisa membaca (buta huruf) sehingga poin persolan SDM ini sangat kompleks sekali, sehingga kabupaten membahas komponen ini menjadi poin dan dibahas di bab khusus yaitu tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)³.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk berdasarkan tiga factor penting yang pertama pendidikan yang baik, kesehatan, dan standard hidup yang layak sehingga dengan tiga factor tersebut akan menciptakan SDM yang layak dan dalam tahapan ini Jember masih kurang dalam mengelola SDM-nya sehingga ada ketimpangan dan kelayakannya masih jauh dari kata baik dibuktikan dari data di atas yang di jelaskan bahwa masih ada banyak hal yang perlu di benahi

² Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

³ Meri, *Statistik*, 10.

dalam penangan SDM-nya dan juga ada beberapa kecamatan yang masih jauh di bawah standard yaitu salah satunya Tempurejo, Silo, Jelbuk lebih spesikasi lagi disini kami ingin membahas bagaimana kinerja pemerintah terkait peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat Jember.

Ketersediaan SDM yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang sesuatu yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten bisa terlaksana dengan baik ketika di masa mendatang ada peramalan akan lebih banyak hal yang dilakakukan pemerintah melalui programnya pemerintah dapat menggunakan SDM nya sendiri untuk mengelola program yang diberikan oleh pemerintah tanpa adanya gangguan perlu dicatat bahwa tugas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan legislatif, dengan melihat perkembangan masyarakatnya sebagai acuan untuk pengembangan kabupaten atau kota. Melihat undang-undang dan keadaan yang terjadi dilapangan maka kesesuaian dengan undang-undang yang meliputi bagiannya, diperlukan bentuk perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Tujuannya untuk mendukung terlaksananya kinerja pembangunan sehingga menciptakan program kerja yang bagus dari hasil aturan yang ideal.⁴ Setiap program yang di sediakan dan di buat untuk masyarakat harus melalui pendampingan yang ketat dan terkualif eperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 bahwa pemerintah memiliki

⁴Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), 98.

kewajibkan pelayanan terhadap masyarakatnya yang terbagi menjadi dua bagian yaitu urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan⁵.

Hukum adalah aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, serta memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁶ Maka dengan adanya aturan yang mengikat harusnya diantara pemerintah dan rakyatnya dapat saling membantu untuk memaksimalkan sebuah perogram yang menjadi kinerja pemerintah. Sebuah program yang ideal berasal dari mimpi yang di aktualisasikan oleh individu lalu kepada kelompok dan sampai pada masyarakat umum. Harapan bagi tiap individu harus diselaraskan dengan peraturan yang berlaku di dalam undang-undang maupun aturan agama sehingga program yang dihasilkan adalah program terbaik atas tatanan dan kelola (kinerja) terbaiknya dalam rumusan kota yang baik dan berkualitas. Seperti yang telah di jabarkan di bawah ini:

Bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 susunan dan tata cara menyelenggarakan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, berisikan tentang bagaimana mengelola pemerintahannya meliputi kinerja apa saja yang perlu dilakukan pemerintah eksekutif maupun legislative daerah kabupaten namun tidak mengurangi atau melampaui gerak pemerintah pusat yang berarti ada Batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh pemerintah kabupaten tersebut sehingga semua lini tersentuh

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

⁶ Nur solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: UIN Khas Press, 2014), 15.

kinerja pemerintah dari mulai aspek infrastruktur dan pelayanan yang efektif dan efisien.⁷

Atas dasar inilah setiap wilayah melaksanakan atau membentuk aturan demi tercapainya keinginan bersama di wilayah masing-masing. Di setiap yang dilakukan oleh warga negara harus berpedoman pada aturan negara tersebut.⁸ Oleh karena itu dari data dan penjelasan yang telah terlampir penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

B. Fokus Penelitian

Dengan dasar latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana peranan pemerintah kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

⁷ UUD 45 (Amandemen ke IV), 11.

⁸Bintaro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), 26.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember
2. Untuk mendeskripsikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember perspektif Undang-Undang NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat tentang Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah terutama kepada peneliti.
 - b. Harapannya hasil penelitian ini bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang serupa dimasa yang mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis mengharapakan penelitian ini bisa dimanfaatkan bersama sehingga memunculkan sumbangan pemikiran untuk dinikmati bersama.

- b. Harapan selanjutnya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pengetahuan yang diperoleh disaat masih aktif menempuh Pendidikan di perguruan tinggi dan diaplikasikan pada kehidupan nyata.
- c. Manfaat selanjutnya ditujukan pada masyarakat umum penelitian ini juga bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari untuk menambah wawasan agar menjadi rumusan supaya diterapkan dalam bentuk aplikasi wabil khusus pada Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pembangunan Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat pengertian berupa istilah penting yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam judul penelitian. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada pemahaman yang keliru terkait arti dan istilah seperti yang dimaksud oleh peneliti.⁹

1. Peranan Pemerintahan

Peranan adalah bentuk kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing individu dan kelompok yang berada di level sosiologis dalam tanda kutip melaksanakan kinerja. Keberadaan individu dan kelompok ini memegang kendali yang sentral.¹⁰ Secara sosiologis, peranan adalah kualitas dinamis yang terwujud dalam tindakan atau perilaku individu yang menduduki atau memegang suatu jabatan serta menggunakan hak

⁹ Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, 45.

¹⁰ R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), 348.

dan kewajibannya sesuai dengan jabatan tersebut. Kapasitas seseorang yang memainkan peran ini dengan baik, dia akan berharap apa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya. Secara umum, peran hadir dalam proses penentuan kontinuitas.¹¹

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan bukti kepedulian pemerintah dan wujud kemakmuran yang alami, Sedangkan perubahan yang terukur ditentukan dengan beberapa variabel yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Namun dibalik itu semua perubahan alami ditentukan seseorang dengan peran yang signifikan. Menurut para ahli pembangunan ialah:

Riyadi dan Dedy Supriyadi Brata Kusumah bahwa istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda bagi setiap individu, daerah satu dengan yang lainnya, negara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan¹².

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai sekumpulan individu atau kelompok yang ada dalam kuantitas suatu organisasi dalam mengupayakan tujuan organisasi tersebut¹³. Menurut George Milkovich dan Paul C.Nystrom, hal itu merupakan proses peramalan, pengembangan, pengempementasian, dan pengontralan yang menjami suatu lembaga yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), 242.

¹² <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>, diakses pada Rabu 12 Mei 2021.

¹³ Suyuti Hasibuan, *Managemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Non Sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), 3.

menjamin kesesuaian jumlah pegawai atau orang yang berkompeten di bidangnya. Dan menurut Mondy dan Noe sebagai proses yang secara sistematis membahas keadaan Indeks Prestasi Manusiannya untuk memastikan jumlah dan kualitas mereka untuk dipakai ketika dibutuhkan.¹⁴

Berdasarkan definisi istilah maka maksud dari penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti bahwa kinerja pemerintah kabupaten Jember masih kurang dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi bagaimana masyarakat Jember bisa menjadi lebih baik lagi, sepertihalnya pemerintah masih kurang dalam membahas tentang Pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan yang layak ketiga poin tersebutlah yang perlu dibahas dan diperbaiki oleh pemerintah Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Berikut Penulis akan memaparkan Beberapa persamaan dan perbedaan karya ilmiah milik penulis dan milik orang lain terkait Kajian Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah:

Bab I berisi tentang pendahuluan menguraikan pokok latar belakang diangkatnya tema pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan aturan perundangan-undangan serta data lapangan yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian menentukan fokus masalah yang akan menjadi landasan pembahasan dalam penelitian ini. Dan selanjutnya mendeskripsikan tujuan,

¹⁴ Suwatno dan Donni Juni Priyansa, *Managemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 45.

manfaat dan definisi istilah terkait peristilahan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci dan detail.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan memuat kajian pustaka yang berisi beberapa penelitian terdahulu untuk mengkomparasikan penelitian ini sekaligus memperkaya khazanah kajian. Supaya peneliti dapat memiliki postulat yang belum atau tidak dibahas peneliti lainnya. selanjutnya dijelaskan kajian teori yang akan digunakan peneliti sebagai pijakan dasar untuk melangkah ke tahap penelitian selanjutnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dimulai dari jenis penelitian yang digunakan sampai pada sistematika penelitian. Dijelaskannya metodologi penelitian ialah dalam rangka memperjelas kerangka penelitian baik kepada peneliti atau pembaca sekalian. Sehingga penelitian ini dapat lebih presisi dan tidak bias tafsir.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis berisi deskripsi panjang yang menarasikan jawaban atas rumusalah masalah yang telah disusun, yang berangkat dari penjelasan latar belakang diambilnya suatu tema dalam penelitian.

Bab V berisi tentang penutup kesimpulan dari hasil analisis dan pengamatan dari Pembahasan. Kemudian disusunlah usulan atau saran atas objek kajian penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Sama dengan yang sudah dijabarkan di latar belakang, untuk membantu analisis yang diteliti secara lengkap dan tepat, maka peneliti berupaya agar melakukan audit pustaka atas penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan sehingga dapat digunakan sebagai komparasi bahan.

1. Penelitian ini dilakukan oleh Sulfira (2016) dengan judul, “Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Kabupaten Bantaeng” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusiannya (SDM) nya sangat kurang hal ini disebabkan oleh pendidikan yang ada di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN sebut saja Tailand, Malaysia, Filipina. Jika dibandingkan dengan beberapa Negara tersebut Indonesia masih tertinggal karena memang penyediaan fasilitas pendidikan yang masih kurang sehingga mengakibatkan kualitas tenaga kerja yang rendah, pengangguran yang besar, produktifitas menurun serta daya saing yang kurang mempuni untuk bersaing dengan tenaga kerja lain baik asing maupun bukan¹⁵.

Persamaan dengan penelitian ini adalah secara praktek pemerintahnya yang masih kurang untuk membahas perkembangan

¹⁵ Sufira, Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Kabupaten Bantaeng, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014), 40.

Sumber Daya Masyarakatnya sehingga perlu adanya tindak lebih lanjut dalam melakukan revitalisasi di berbagai lini untuk menciptakan sumber daya manusia yang layak dan mampu bersaing di dunia kerja.

Perbedaannya dengan penelitian ini ialah bahwa di penelitian ini lebih pada ekonomi dari masyarakatnya dan terfokus pada SDM yang mengembangkan di wilayah berdasarkan wilayah saing ekonominya sedangkan penelitian kami yang dilakuakn di Jember lebih pada sumberdaya manusianya yang menyeluruh karena memang pembahasan terkait hal tersebut masih sangat Kurang untuk Kabupaten Jember itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakuakn oleh Zuryat Rachmatullah (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” dari penelitian yang dilakukan ialah memberikan hak kebebasan untuk mengelola dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan dikembalikan kepada masyarakat untuk memilih mana yang lebih menguntungkan kepada masyarakat dalam tanda kutip adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat ikut andil dalam menentukan zonasi tersebut dengan pemerintah daerah yang melakukan penyusunan.¹⁶

¹⁶ Zuryat Rachmatullah, Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 47.

Persamaan dari penelitian ini adalah kinerja pemerintah terkait perencanaan peningkatan kualitas mutu masyarakat untuk menciptakan potensi terbukanya lapangan pekerjaan yang luas sehingga menciptakan suasana yang kondusif dengan berkurangnya angka pengangguran dan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator untuk mengupayakan makin baiknya masyarakat di masa mendatang.

Perbedaannya disini cakupannya ada dua bagian dari penelitian yaitu tentang potensi alam dan potensi manusianya yaitu SDM nya itu sendiri yang artinya pembahasan yang dilakukan menggabungkan antara kedua objek tersebut untuk di jadikan penelitiannya sedangkan penelitian kami merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM)-nya saja.

3. Penelitian yang dilakukann oleh Mutmainna “Analisis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kompetensi Masyarakat (Studi pada Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)” hasil dari peneliitian ini ialah peranan pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat, dalam hal ini ibu-ibu supaya terampil mengolah cabai dan tomat menjadi barang komoditas. Hal ini nantinya, akan dilaksanakan melalui upaya memberikan pelatihan untuk membawa perubahan di masyarakat. Sehingga, pemerintah dapat membantu masyarakat menjadi lebih berkompeten, seperti petani yang sudah lebih paham memilih bibit yang bisa mengolah cabai dan tomat menjadi saos. beberapa faktor yang memastikan pemerintah dapat secara efektif menjalankan perannya dalam meningkatkan kompetensi masyarakat:

- a. Membuat sosialisasi setiap enam bulan sekali bersama masyarakat di Kantor Desa.
- b. Memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu mengenai pengolahan bahan mentah cabai dan tomat agar menjadi produk komoditas bernilai.
- c. Memfasilitasi ruangan yang baik dengan *handbook*.
- d. Masyarakat yang telah terampil memilah dan memilih pupuk supaya kualitas cabai dan tomat yang ditanam itu baik.¹⁷

Persamaanya dengan penelitian yang kami lakukan adalah dalam mengelola Sumber Daya Masyarakatnya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada artinya ada aktifitas upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Perbedaanya ialah terkait dengan bagaimana pemerintahnya melakukan penanganan yang dilakukan terhadap masyarakatnya dan objek yang dilakukan pun tidak sama yang penelitian ini di pusatkan pada SDM yang ada di desa sedang yang kami lakukan di tingkat kinerja Kabupaten.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rusman (2022) dengan judul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)” hasil dari penelitian tersebut di temukan bahwa para nelayan disana sudah mulai

¹⁷ Mutmainna, Analisis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kompetensi Masyarakat (Studi pada Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014), 58-59.

menjadi nelayan sejak di usia masih 13 tahun untuk membantu orang tuanya sehingga perihal pendidikan sudah sejak dini terkesampingkan dan penghasilah rata-rata dari nelayan mulai 100.000-500.000 Rp yang bagi masyarakat disana masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan untuk anak, faktor yang membuat hal ini terjadi dikarenakan kurangnya edukasi tentang bagaimana hasil dari nelayan di manfaatkan sebaik mungkin. Nah peran Pemerintah kelurahan Jampue ini memberikan Edukasi tentang bagaimana memanfaatkan pasar, jadi hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya menunggu para pengepul dengan adanya gerak dari pemerintah kelurahan ahirnya mulai di pasarkan sendiri ke pasar atau di jual langsung ke bos ikan¹⁸.

Persamaan penelitian ini dengan yang kami lakukan adalah pemerintah yang melakukan aktifitas pengembangan daya berfikir yang dalam tanda kutip adalah peningkatan kualitas untuk menghadapi tantangan zaman yang makin kesini dibutuhkan skil lebih untuk bersaing dengan yang lain, penelitian ini pun membahas tentang bagaimana peran pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Manusia.

Perbedaanya dengan penelitian kami ialah penelitian ini terfokus pada ekonomi yang berpusat pada hasil laut (profesi nelayan) sedangkan penelitian yang kami lakukan masih di wilayah peningkatan mutu dan kualitasnya untuk menciptakan masyarakat yang paham terkait

¹⁸ Rusman, Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah), (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Pare-Pare, 2022), 44-45.

pendidikan untuk mengembangkan minat masyarakat untuk mengurangi angka buta huruf (Pendidikan yang masih kurang).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Susana (2020) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar” penelitian ini membahas tentang pelayanan administrasi di tingkat desa hasil dari penelitian ini disampaikan bahwa administrasi di wilayah tersebut masih carut marut dikarenakan masih belum memiliki kantor pelayanan administrasi sehingga hanya melakukan administrasi melalui sekretaris desa yang dilakukan terkadang di rumahnya namun juga bisa di warung kopi sehingga yang terjadi tidak masifnya pengelolaan administrasi dalam tanda kutip administrasinya carut marut namun ini masih bisa dikatakan administrasi berjalan meskipun memang dalam aplikasinya masih jauh dari kata layak dikarenakan memang tidak adanya kantor khusus pelayanan administrasi.

Persamaanya dengan penelitian yang kami lakukan terkait pembahasan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Gampong, yang penelitian ini mengangkat pelayanan pemerintah di bidang administrasi, sedangkan perbedaannya dengan penelitian kami adalah penelitian ini lebih berfokus pada persoalan administrasi di wilayah kecamatan kuta glie kabupaten Aceh Besar .

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	NAMA dan JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Kabupaten Bantaeng	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif persamaan dengan penelitian ini adalah secara praktek pemerintahnya yang masih kurang untuk membahas perkembangan Sumber Daya Masyarakatnya sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam melakukan revitalisasi di berbagai lini untuk menciptakan sumber daya manusia yang layak dan mampu bersaing di dunia kerja.	Di penelitian ini lebih fokus pada kineja dan tidak membahas Undang-Undang perbedaannya dengan penelitian ini ialah spesifikasinya bahwa di penelitian ini lebih pada ekonomi dari masyarakatnya dan terfokus pada SDM yang mengembangkan di wilayah saing ekonominya sedangkan penelitian kami yang dilakuakn di Jember lebih pada sumberdaya manusianya yang menyeluruh karena memang pembahasan terkait hal tersebut masih sangat Kurang untuk Kabupaten Jember itu sendiri.
2	Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan kualitatif empiris seta juga menggnakan Undang-Undang yang sama persamaan dari penelitian ini adalah kinerja pemerintah terkait perencanaan peningkatan kualitas mutu masyakat untuk menciptakan potensi terbukanya lapangan	Lebih pada kinerja di poin kelautan atau paada hasil laut perbedaannya disini cakupannya ada dua bagian dari penelitian yaitu tentang potensi alam dan potensi manusianya yaitu SDM nya itu sendiri yang artinya

		pekerjaan yang luas sehingga menciptakan suasana yang kondusif dengan berkurangnya angka pengangguran dan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator untuk mengupayakan makin baiknya masyarakat di masa mendatang.	pembahasan yang dilakukan menggabungkan antara kedua objek tersebut untuk di jadikan penelitiannya sedangkan penelitian kami merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM)-nya saja.
3	Analisis Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kompetensi Masyarakat (Studi pada Desa Singki Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)	Metode yang digunakan menggunakan kualitatif sama menggunakan studi lapangan Adapun persamaanya dengan penelitian yang kami lakukan adalah dalam mengelola Sumber Daya Masyarakatnya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada artinya ada aktifitas upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.	Peningkatan kompetensi perbedaannya ialah terkait dengan bagaimana pemerintahnya melakukan penanganan yang dilakukan terhadap masyarakatnya dan objek yang dilakukan pun tidak sama yang penelitian ini di pusatkan pada SDM yang ada di desa sedang yang kami lakukan di tingkat kinerja Kabupaten.
4	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan di Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)	Metode yang digunakan menggunakan kualitatif persamaan penelitian ini dengan yang kami lakukan adalah pemerintah yang melakukan aktifitas pengembangan daya berfikir yang dalam tanda kutip adalah peningkatan kualitas untuk menghadapi tantangan zaman yang makin kesini dibutuhkan skill lebih untuk bersaing dengan yang lain,	Pemberdayaan masyarakat perbedaannya dengan penelitian kami ialah penelitian ini terfokus pada ekonomi yang berpusat pada hasil laut (profesi nelayan) sedangkan penelitian yang kami lakukan masih di wilayah peningkatan mutu

		penelitian ini pun membahas tentang bagaimana peran pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM).	dan kualitasnya untuk menciptakan masyarakat yang paham terkait pendidikan untuk mengembangkan minat masyarakat untuk mengurangi angka buta huruf (Pendidikan yang masih kurang).
5	Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar	Metode yang digunakan adalah kualitatif persamaanya dengan penelitian yang kami lakukan terkait pembahasan pelayana masyarakat yang dilaukan oleh pemerintah desa Gampong, yang penelitian ini mengangkat pelayanan pemerintah di bidang administrasi	Pada pelayanan pemerintah desa sedangkan perbedaannya dengan penelitian kami adalah. penelitian ini lebih berfokus pada persoalan administrasi di wilayah kecamatan kuta glie kabupaten Aceh Besar

B. Kajian Teori

1. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

a. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah ilmu dan seni mengelola sesuai dengan yang memiliki tanggung jawab yang berarti pemimpin pemerintahan yang berfikir tanpa memiliki dasar pendidikan pemerintahan, namun mampu bertidak dan memiliki karismatiknya dalam melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan, dan dikatakan sebuah disiplin ilmu dikarenakan mampu memenuhi syarat-syarat berupa dapat dipelajari dan diajarkan,

mempunyai objek yang berupa objek fomal dan materil, juga bersifat universal, berurutan serta mempunyai kekhususan¹⁹.

b. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Keharusan yang tersimpulkan dari kata pemerintah pada dasarnya tertulis dalam bentuk Perundang-undangan. Untuk menunjukkan adanya wewenang yang sah dari pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintah dianggap tidak sah dan tidak adanya kekuatan hokum dari pemerintah itu, Dengan demikian maka pemerintah tidak punya power lagi.

Memerintah diartikan sebagai menguasai atau merawat dan mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari Negara, maka dengan hal ini pemerintah bahasa pemerintah bermakna kekuasaan untuk memerintah Negara, sebagai contoh dalam kalimat Negara memerlukan pemerintah yang kuat dan bijaksana, atau bisa pula pemerintah bermakna sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.

Pemerintahan merupakan perbuatan atau metode urusan memerintah, seperti misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan dictator, pemerintahan demokratis dan pemerintahan yang lain-lain, jadi berbicara pemerintahan, sistem pemerintahan berarti suatu

¹⁹ Ahmad Mustanir, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 1.

prosedur atau cara yang saling berhubungan dalam rangka mengatur kegiatan pemerintah.²⁰

Agar gagasan pelaksanaan otonomi dapat berjalan dengan baik, banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan *good local governance*, salah satu prinsip yang perlu mendapat perhatian, menjadi salah satu dari berbagai pertimbangan tersebut.²¹ Terutama pada persoalan pekerjaan konkuren pemerintah yang perlu diperhatikan dengan baik dan di Kelola dengan benar sehingga menciptakan lingkungan yang dinamis.

Administrasi negara identik dengan pemerintahan. Asep Warlan Yusuf mendefinisikan kerja-kerja negara diejawantahkan menjadi badan atau kedudukan dalam kekuasaan eksekutif dengan kewenangan independen, dengan menjalankan amanat undang-undang dalam melaksanakan pengaturan negara dan tindakan yang berkaitan dengan administrasi.²² Pemerintah yang berperan sebagai administrator negara direpresentasikan sebagai badan atau jabatan-jabatan tertentu.

Dan struktur tersebut merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

²⁰ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: UNPAD PRESS, 2015), 95.

²¹ Syaukani H.R., *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, 2003), 4.

²² Asep Warlan Yusuf, *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang Suatu Model Pendekatan Sistem*, (Disertasi, Universitas Indonesia Jakarta, 2002), 22.

masyarakat.²³ Tentunya dengan mengedepankan kepentingan umum sehingga cita-cita bersama bisa di wujudkan dalam pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang mengedepankan kepentingan umum.

Pemerintah, berfungsi sebagai salah satu objek penyelenggaraan kerja-kerja pemerintahan.²⁴ Dua karakter diwakili oleh atau terkandung dalam cabang kekuasaan eksekutif: pertama, sebagai instrumen atau individu negara yang bekerja untuk kepentingannya. Sebagai badan administrasi negara dengan kekuasaan independen yang didelegasikan oleh negara, kewenangan eksekutif dapat melakukan tindakan mandiri di bidang pengaturan (*regelen*) dan pelaksanaan administrasi negara (*besturen*) berkat kekuatan independen tersebut.²⁵ Ada kinerja yang perlu dilakukan secara mandiri atau inisiatif pemerintah untuk melakukannya sehingga hal ini memang bisa dikatakan ketika ada hal yang genting yang perlu dilakukan tanpa melibatkan masyarakat terlebih dahulu, bida sebut pengambilan keputusan secara mandiri.

Pada hakekatnya ada dua cara menilai keabsahan tindakan pemerintah: pertama, asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis dan peraturan perundang-undangan sebagai

²³ Kadar Slamet, *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2013), 38.

²⁴ I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2016), 12.

²⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni 1997), 159.

aturan tertulis. Pertama dan terutama, aturan sebagai standar untuk tindakan pemerintah diperlukan untuk pemerintah. Perincian demikian merupakan suatu standar umum peraturan penyelenggaraan negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini diwajibkan dalam suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan negara secara umum.²⁶

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan komponen dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. Adapun jenis pembangunannya dibagi atas:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJB daerah)
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM daerah)
- c. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) penjelasan dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun dengan merujuk kepada rencana kerja pemerintah pusat.²⁷

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik*, (Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2, 2006), 126.

²⁷ Inu Kencana Syafii, *Menejemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT PERCA, 2007), 78.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara lisan maupun tertulis dari sumber yaitu orang beserta perilaku yang diamati²⁸. Pendekatan kualitatif cenderung pada metode deskriptif karena mencoba menjelaskan sesuatu yang terjadi sehingga arah dan prosedurnya menghasilkan penelitian yang deskriptif.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dimana data diperoleh melalui Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi data, dan informasi yang di analisis menggunakan metode Miles, Humberman berupa mereduksi data yang sudah ada, disediakan, dan diverifikasi sebagai sebuah kesimpulan serta rumusan masalah dalam tinjauan penelitian ini terjawab.

Penggunaan prosedur purposif merupakan standarisasi sebuah data dan sumber dalam penelitian ini untuk menentukan dan menemukan informan. Dalam penelitian ini BPS dan pemerintah kecamatan tempurejo merupakan informan utama.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 23.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Tempurejo desa Curahnongko Kabupaten Jember

Metode purposif area merupakan metode untuk menentukan tempat dalam penelitian ini. Pemilihan tempat atau lokasi penelitian kecamatan Tempurejo desa Andungrejo Kabupaten Jember secara sengaja dan sadar dipilih sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.

C. Subyek Penelitian

Metode purposif sampling yang digunakan peneliti secara tehknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ini. Yaitu dengan tehnik mengambil sampel rujukan data dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut berarti bahwa, subjek informan dalam penelitian dianggap sebagai subjek yang memiliki sebuah pengetahuan yang terkait harapannya agar data dan informasi yang di dapat peneliti valid, dan apabila informan pemangku kebijakan makan akan semakin mudah untuk mendapatkan data baik berupa objek atau keadaan sosial.

Subjek penelitian merupakan iformasi dan hal-hal yang menjadi rujukan data penelitian. Maka dengan begitu, ketajaman peneliti memiih subjek penelitian dengan perolehan data sesuai dengan variabel. Berikut informan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Ibu qonita, sebagai kariawan tetap BPS Kabupaten Jember
2. Bapak Pungki, sebagai kariawan tidak tetap BPS Kabupaten Jember
3. Bapak Defki, sebagai kariawan tidak tetap BPS Kabupaten Jember

4. Ibu Raoda, sebagai pegawai kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
5. Bapak Faesol, sebagai warga kecamatan Tempurejo desa Andung Rejo Kabupaten Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan data yang dipakai menggunakan metode dokumentasi, gambar, catatan. Adapun yang dimaksud dengan metode dokumentasi yaitu sekumpulan berkas untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan. Artinya, rujukan data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, antara lain Sumber data sekunder, hasil data penelitian di lapangan, mencakup buku, dokumen resmi, dan penelitian yang sudah berbentuk laporan.²⁹ Berikut adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bisa dipakai dalam metode penelitian apapun, salah satunya penelitian kualitatif, serta digunakan untuk mendapatkan informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian istilah observasi dalam penelitian kuantitatif hanya dikenal dengan satu nama saja, yaitu tehknik obsevasi (pengamatan).

2. Dokumentasi.

Dokumen merupakan hal yang bersifat materi serta dapat digunakan sebagai media informasi dari kajian masalah yang sumber utamanya adalah observasi partisipan dan wawancara sebagai contoh diari,

²⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, Granit, 2004), 57.

memo, surat, video, fotografi, film, rekaman kasus klinis dan lain-lain. Beberapa jenis dokumen yang dapat dipertimbangkan. Mengenai hasil perolehan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dokumen budaya populer
- b. Dokumen pribadi
- c. Dokumen resmi
- d. Foto temuan
- e. Fotografi dan film
- f. Foto hasil peneliti³⁰.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan yang mengetahui dengan apa yang mau diketahui oleh penulis, dalam hal ini penulis memfokuskan pada tiga elemen yaitu pemerintah kecamatan, masyarakat di daerah kecamatan, dan BPS kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, wawancara semi terstruktur menjadi pedoman sebagai pilihan bagi peneliti dalam wawancara, berupa mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada informan yaitu pegawai BPS, Pemerintah kecamatan Tempurejo, dan masyarakat desa Andung rejo. Namun peneliti lebih mendalam mempertanyakan yang sudah tersedia supaya lebih jelas data yang dikumpulkan tersebut.

³⁰ Rulam Ahamadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: UM Pres, 2005), 101.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Pendekatan kualitatif (Metode Miles and Huberman).

Penulis menggunakan tehknik analisis deskriptif. Dalam metode ini meneliti suatu data penulis menggunakan beberapa sumber referensi buku ataupun jurnal ilmiah serta terjun ke lapangan yang pastinya judul yang di angkat berkaitan dengan tema yang di tulis oleh penulis dalam penyusunan Skripsi ini. sehingga dengan metode kualitatif ini penulis terus memperbanyak refrensi-refrensi sebagai rujukan dalam penyelesaian skripsi ini apakah kinerja pemerintahan kabupaten Jember sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pola rpikir pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Deduksi Data (*Date Deduction*).

Deduksi data yang berarti merangkum, yang bertitik tolak dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti seperti apakah peranan pemerintahan kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Data yang telah di deduksi mempermudah bagi peneliti melakukan pengumpulan data dan mencarinya karena memberikan gambaran yang lebih jelas. Lebih spesifik, pelaksanaan kegiatan deduksi data yang telah dikerjakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Date Display*).

Penyajian data ialah sekumpulan informasi untuk memberikan kesempatan penariakan tindakan dan kesimpulan. Penyajian data Pustaka bisa dikerjakan melalui bentuk simple, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* atau sejenisnya. Penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif.

Dari data yang di dapat peneliti Jember masih sangat kurang dalam melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki angka pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak di kabupaten Jember

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Kesimpulan merupakan langkah ketiga dari pendapat “Miles dan Huberman”. Demikian dapat disimpulkan dalam penelitian bahwa, apa yang dinarasikan adalah hasil penjelajahan ilmiah yang didapatkan setelah pembahasan dinyatakan rampung.

F. Keabsahan Data

Peneliti melakukan usaha untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan dibagian ini. Untuk memperoleh data yang valid, perlu kiranya kebenarannya dengan memakai teknik-teknik keabsahan data seperti menambah kehadiran peneliti di lapangan, observasi lebih mendalam, dengan memeriksa kesinkronan hasil. Dan untuk memperoleh penelitian yang abash dengan kredibilitas yang tinggi maka peneliti melakukan penerjunan langsung dengan memperpanjang waktu penerjunan dan selalu membawa jurnal penelitian kepada responden yang di dalamnya berisi penelitian yang

dilakukan oleh peneliti di lapangan, serta tidak lupa menyesuaikan hasil dengan cara bertukar pemikiran.

Derajat Kepercayaan (*Credibility*) dan Tahapan-Tahapan Penelitian. Pemberlakuan kesesuaian tingkat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non aktualisasi. Hal ini berfungsi sebagai kriteria tingkat kepercayaan hasil-hasil penemuannya bisa di capai serta dibuktikan oleh peneliti pada fakta yang ganda yang sering di teliti.³¹ untuk memeriksa kredibilitas dan tingkat kepercayaan kegiatan sebagai berikut:

a. Triangulasi Data

Upaya pengecekan kebenaran tertentu dan membandingkan perolehan data dengan sumber yang lain, dari berbagai tahapan penelitian Pustaka di waktu yang lain juga memakai metode yang beda.³² Berbagai cara bisa dilakukan, sebagai berikut:

b. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber merupakan metode pengujian kredibilitas data dengan memeriksa data yang sudah di dapatkan. Perolehan data dari berbagai rujukan untuk dijadikan keabsahan dalam penelitian kualitatif tidak bisa dirata-ratakan sebagai penelitian, namun dikategorikan dan dideskripsikan mana spesifikasi data dan mana pandangan yang berbeda dari data tersebut.

³¹Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 94.

³²Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Pustaka*, (PT. Remaja Rosda karya: Bandung, 1999), 52.

Perolehan data yang telah di analisis oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan dan selanjutnya meminta kesepakatan kepada sumber data tersebut.

G. Tahap- Tahap Penelitian

1. Persiapan / Penelitian Lapangan

a. Menyusun Proposal Penelitian

Tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, Selanjutnya mengajukan judul, dan seterusnya melakukan konsultasi pada dosen pembimbing, hingga proses penyusunan skripsi.

b. Mengurus Perizinan

Perizinan diajukan oleh peneliti kepada pihak akademik untuk mendapatkan surat perizinan terjun lapangan untuk mencari data. Perizinan di minta melalui pihak Akademik Fakultas Syariah.

c. Menyusun Instrumen Penelitian

Peneliti menyusun kerangka penelitian yang memuat daftar wawancara atau pertanyaan untuk narasumber yang terdapat dalam observasi dan pendataan mengenai dokumen keperluan yang diperlukan.

d. Tahap pelaksanaan di Lapangan

Di tahap ini peneliti terjun ke lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat sesuai perancangan yang dilakukan dan sesuai kebutuhan.

e. Pengolahan / Analisis Data

Tahapan terakhir dari penelitian adalah melakukan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui ujian ataupun sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Secara Kinerja Pemerintahan Kabupaten Jember Pada Angka Pendidikan, Kesehatan, Dan Kehidupan Yang Layak di Kabupaten Jember

Pemerintahan kabupaten Jember dalam menjalankan tugasnya sebagai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan kinerja wajibnya terkait Pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, telah berupaya melakukan kinerja-kinerja terbaiknya agar keinginan dari masyarakat Jember bisa terwujud. Pemerintahan kabupaten Jember bekerja sama dalam menjalankan tugasnya, karena yang memiliki tanggung jawab disini tidak hanya pada pemerintahan eksekutif namun juga legislatif keduanya harus searah dalam menyusun program kerja.

Pemerintahan eksekutif dan legislatif disinipun tidak terpokok pada tingkat pemerintahan kabupaten melainkan juga di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Berbicara kecamatan peneliti disini memilih kecamatan Tempurejo desa Andungrejo sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. Jadi peneliti melihat dan menganalisa keadaan yang ada di desa andungrejo kecamatan tempurejo dengan keadaan tingkat pendidikan yang masih kurang dan angka kesehatan masih bisa dibilang juga kurang serta kehidupan yang layak pun masih tak semua masyarakat di kecamatan Tempurejo, desa

Andungrejo sudah memiliki kehidupan yang layak ketika kami wawancara dengan ahmad faisol

“kalo ngomongin pendidikan di desa ini masih banyak orang ang Cuma lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD pun masih banyak mas, kalo kesehatan yaaaaaaa namanya juga desa mas kalo sakit ya cukup obat yang di took-toko itu mas, dan kalo kehidupan yang layak apa disini itu mas banyak tanah yang bersengketa dengan perkebunan jadi kalo ngomongin hidup yang layak ya gak layak mas kita disini hidupnya berasa numpang karena itu tadi banyak tanah yang bersengketa mas”

³³

Jadi seperti wawancara di atas memang sudah menunjukkan bahwa masyarakat Jember secara garis besar masih kurang dalam mengatasi masalah yang terjadi terkait tiga hal itu. Ini membuktikan bahwa penyalarsan kinerja dai pemerintahan kabupaten sampai pada pemerintaha desa masih kurang terbukti ketika berbicara kecamatan yang masuk pada kecamatan pinggir kabupaten masih sang kurang

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kinerja pemerintah dapat dilihat melalui beberapa aspek seperti data-data yang menunjukkan terkait seberapa berhasilakah kabupaten jember dalam melaksanakan tugasnya, disini kami memberikan data melalui BPS kabupaten Jember, semua bisa dilihat di hasil pengu,mpulan data BPS, dengan melihatnya maka kita dapat menyimpulka apa yang dilakukan pemerintah kabupaten Jember melalui kinerjanya.

³³ Ahmad Faisol, *Wawancara (15 November 2022)*

Berdasarkan definisi Human Development Report (HDR) yang diterbitkan pada tahun 1990, menyatakan pembangunan manusia adalah proses meningkatkan pilihan yang dimiliki orang, Pilihan paling signifikan di antara banyak pilihan ini adalah memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak, untuk dididik, dan untuk hidup panjang dan sehat.

Berdasarkan sejumlah aspek mendasar dari kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kemajuan pembangunan manusia. HDI dibangun dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi mendasar sebagai ukuran kualitas hidup. Umur panjang yang sehat adalah salah satu aspek ini pengetahuan dan kehidupan yang terhormat Karena keterkaitannya dengan banyak faktor, ketiga dimensi ini memiliki arti yang sangat luas. Angka harapan hidup saat lahir digunakan untuk menentukan dimensi kesehatan. Kombinasi indikator angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah juga digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Sebagai pendekatan pendapatan yang merepresentasikan capaian pembangunan untuk hidup layak, indikator daya beli masyarakat digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak untuk sejumlah kebutuhan pokok. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah pengeluaran per kapita.³⁴

³⁴ Meri, *Statistik*, 23.

- a. Angka Harapan Hidup: Angka Harapan Hidup (AHH) menurut almanak kelahiran merupakan rata-rata perkiraan waktu yang dijalani manusia semasa hidup.
- b. Angka Melek Huruf: Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
- c. Rata-Rata Lama Sekolah: Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
- d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan: UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula atkinso.

Ketika berbicara kinerja maka akan membicarakan hasil dari sebuah kinerja tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ketika data dari BPS sudah ada maka tindak lanjut dari hasil penelitian BPS itu bisa di benahi poin yang masih rendah secara nilai bagi kemajuan di wilayah Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten jember tersebut. Secara teori Jember seharusnya lebih mudah untuk mengatasi problem tersebut, namun ternyata pada poin uplikasi kinerja Jember masih sangat

kurang dalam proses penindak lanjutan terkait kualitas Pembangunan Manusia.³⁵

2. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pusat pembangunan yang proses dan hasilnya harus dilakukan secara terencana dan terpadu demi mendapatkan hasil sumberdaya manusia yang berkualitas. Kualitas potensi suatu bangsa sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, utamanya aspek kesehatan, pendidikan atau pengetahuan, dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga aspek tersebut menjadi penentu kuantitas sekaligus kualitas dampak dari pembangunan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai hal untuk selalu mengerjakan tanggung jawabnya terkait pembangunan yang seimbang, antara pembangunan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur, salah satu indikator pembangunan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) angka IPM Jember pada tahun 2020 sebesar 67,11 kenaikan dari sebelumnya 0,42 persen berikut angka IPM selama tiga tahun terakhir Tahun 2018: 65,96, Tahun 2019: 66,69, Tahun 2020: 67,11.³⁶

Jember sudah menjalani fase awal bonus demografi ketika dikalkulasikan Jember sudah dalam tahap lansia dibiayai oleh tiga orang

³⁵ Meri, *Statistik*, 25.

³⁶ Meri, *Statistik*, 30.

produktif, maka perlunya gejotan kualitas layak pakai, dengan begitu maka lapangan pekerjaan bisa tercipta dari banyak pemudanya artinya tidak berpangku tangan sama kabupaten untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika kualitas hidupnya tinggi tak ayal ketika berbicara Jember bisa menjadi kabupaten maju, namun pada faktanya saat ini yang masuk dalam angka produktif itu tadi masih banyak yang menganggur dan berpangku tangan pada program atau lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah, inilah efek dari kualitas yang masih kurang.

Keinginan menjadi kabupaten yang maju adalah keinginan setiap masyarakat yang berada di Kabupaten tersebut secara keinginan, namun dalam proses mencapai kesana yang sangat susah tercapai dalam beberapa tahun program yang kabupaten Jember canangkan, padahal untuk menjadi Kabupaten yang maju maka poin paling inti adalah masyarakatnya berkualitas. Bukti kualitas masyarakat ditunjukkan dengan data pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai dan mengkomodir, kehidupan yang layak. Berikut kami menyertakan dari masing-masing aspek yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kabupaten dan dengan data ini kita bisa melihat seberapa jauh kinerja Pemerintah Kabupaten Jember sesuai amanat Undang-Undang sebagai berikut:

a. Kesehatan

Kesehatan adalah aspek penting dari *humans development* dan dasar untuk bidang studi lainnya. Kesehatan manusia diperlukan agar pembangunan yang berpusat pada SDM dapat terwujud. Investasi

sumber daya manusia melalui kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan siklus hidup, yang dimulai sebelum bayi lahir dan berlanjut hingga tumbuh menjadi calon generasi yang sehat, mengingat sangat pentingnya peran kesehatan dalam pembangunan manusia dan upaya mewujudkan manusia.³⁷

Status kesehatan seseorang memberi mereka kemampuan untuk menjadi lebih produktif, yang berarti mereka dapat bersaing dengan orang lain di tempat kerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Kesehatan yang buruk tidak akan mempengaruhi produktivitas atau daya saing pekerja. Penduduk yang produktif sangat mungkin menjadi tidak produktif atau bahkan menjadi beban jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan. Kalaupun hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif yang produktif, beban ini semakin bertambah. Kemiskinan dan ekspansi ekonomi akan terpengaruh oleh kondisi ini jika terus berlanjut.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan angka harapan hidup selama lima tahun dari 2015:

Tabel 4.1
Harapan Hidup

2015	2016	2017	2018	2019
68,20	68,31	68,74	68,99	69,15

Sumber BPS Kab. Jember

³⁷ Riski Elviah dan Arumita Hertriesa, *Indeks Pembangunan Manusia 2021* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2021) 35.

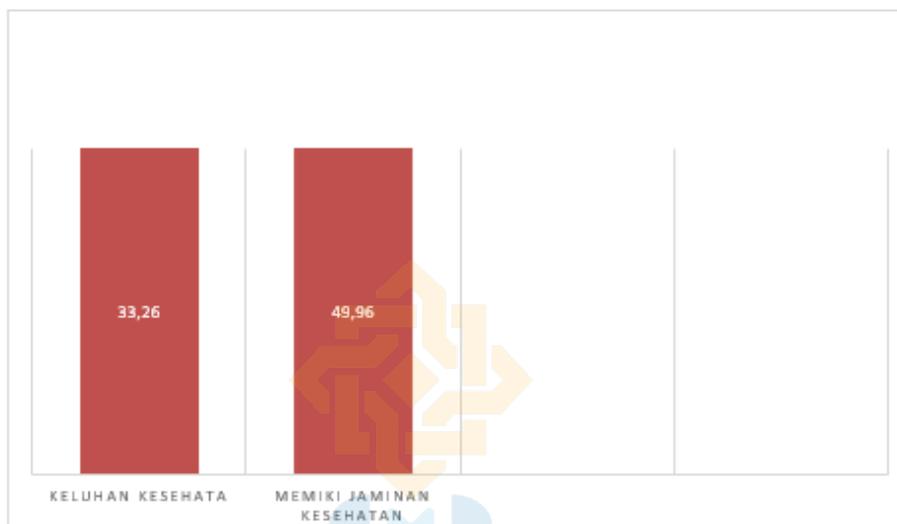
Pembangunan menjadi sangat berarti jika ketiga aspek tersebut juga dapat dinikmati masyarakat seiring percepatan perkembangan pembangunan daerah. Kesejahteraan akan dirasakan masyarakat jika pembangunan yang terjadi dapat memberikan implikasi pada tercapainya umur panjang dan sehat, pendidikan atau pengetahuan semakin meningkat, serta kehidupan yang layak secara ekonomi. Kondisi kesehatan masyarakat dapat tercermin dari tingkat keluhan kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Keluhan kesehatan adalah kondisi dimana kesehatan sedang terganggu, baik yang sampai mengganggu aktivitas keseharian maupun tidak sampai mengganggu aktivitas (bekerja, sekolah, bermain, dan sebagainya).³⁸

Pada tahun 2020 terdapat sekitar 33,26 persen penduduk Jember yang mengalami keluhan kesehatan. Demi memudahkan dalam bidang kesehatan, sebagian masyarakat Jember telah memiliki jaminan kesehatan. Sebanyak 49,96 persen atau setengah dari penduduk Jember telah memiliki jaminan kesehatan.

Berikut adalah masyarakat Kabupaten Jember yang memiliki keluhan masalah kesehatan dan juga yang memiliki jaminan kesehatan terkait pelayanan pemerintah di bidang kesehatan dan berikut gambar presentasinya:

³⁸ Riski dan Arumita, *Indeks*, 36.

Gambar 4.1
Presentase penduduk yang mengalami keluhan dan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

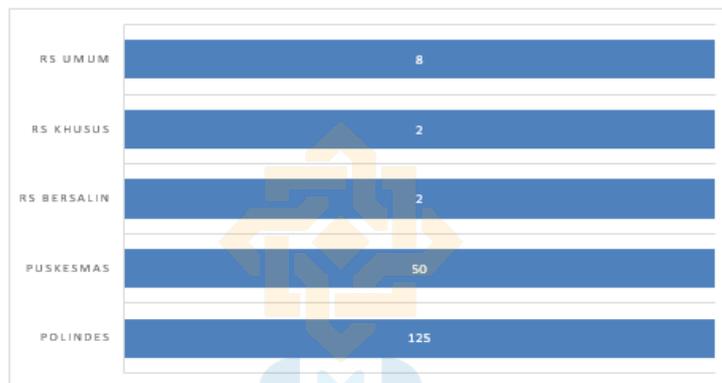


Sumber: Statistik Kesra, BPS Prov Jawa Timur

Diharapkan nantinya semakin banyak penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Mengharapkan kondisi kesehatan yang baik tentunya memerlukan dukungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta kesehatan lingkungan yang memadai. Pada tahun 2020 di Jember tersedia sebanyak 14 rumah sakit yang meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan rumah sakit bersalin/rumah bersalin, 50 puskesmas, dan 125 polindes. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Jember 2020. Mengharapkan kondisi kesehatan yang baik tentunya memerlukan dukungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta kesehatan lingkungan yang memadai. Pada tahun 2020 di Jember tersedia sebanyak 14 rumah sakit yang meliputi rumah sakit umum,

rumah sakit khusus dan rumah sakit bersalin/rumah bersalin, 50 puskesmas, dan 125 polindes.³⁹

Gambar 4.2
Jumlah Fasilitas Kesehatan Jember



Sumber: Kab. Jember Dalam Angka, BPS Kab. Jember

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Jember 2020 Kesehatan lingkungan turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang dapat digunakan untuk melihat kesehatan lingkungan adalah ketersediaan fasilitas buang air besar. Sanitasi yang baik akan identik dengan kondisi kesehatan yang baik pula. Di Jember masih terdapat 22,12 persen rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar (BAB). Umumnya mereka langsung BAB ke sungai. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah jika ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pola kesehatan yang baik dibuktikan melalui optimalisasi penyediaan sarana kesehatan. Dan fasilitas ini mesti bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Secara

³⁹ Riski dan Arumita, *Indeks*, 40.

presentase angka kesehatan memang mengalami kenaikan data yang kami dapat sebagai berikut: Tahun 2016/ 0,74, Tahun 2017/ 0,75, Tahun 2018/ 0,75, Tahun 2019/ 0,75, Tahun 2020/ 0,76.

Dengan adanya beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa kesehatan di wilayah Kabupaten Jember masih dalam taraf yang masih kurang untuk penanganannya secara data tiap tahun memang naik namun kenaikannya tidak signifikan hanya pada angka nol, sekian persen, sedangkan pertumbuhan penduduknya pesat dengan begini berarti tidak balance antara kesehatan dan pertumbuhan penduduknya. Padahal pada aspek kesehatan ini menjadi penunjang kepada Indeks Pembangunan Manusia kalau di angkakan 30 persen.

b. Pendidikan

Pendidikan memainkan peran sentral dalam memajukan suatu bangsa. Selaion sentral, pendidikan berada di level strategis yang membuatnya harus digunakan sebaik mungkin oleh negara.

Kemajuan pendidikan adalah satu hal, dan kemajuan negara adalah hal lain. Karena keduanya sama sekali berbeda maka elaborasi peran negara terhadap masyarakat untuk menyediakan akses pendidikan menjadi hal mutlak yang mesti dipenuhi.⁴⁰

Penilaian kapasitas pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai cara. Salahsatu yang dapat digunakan ialah pendataan

⁴⁰ Riski dan Arumita, *Indeks*, 45.

jenjang pendidikan yang telah ditempuh serta menganalisis rata-rata waktu pendidikan diselesaikan.

Pendidikan ibarat sebuah proses bertahap, yang melewati input-proses-output yang saling berkaitan. Angka rata-rata lama sekolah merupakan sebuah output dari jumlah murid dan partisipasi sekolah sampai dengan lulus. Rangkaian proses inilah yang perlu diperhatikan agar dalam menyusun program pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Rata-rata lama sekolah juga berkaitan dengan ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan kualitasnya semakin baik, sehingga nilai pembangunan manusia juga akan meningkat. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tentunya tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Pada tahun 2020 di Jember tersedia fasilitas pendidikan dan berikut adalah data Guru, siswa sesuai jenjang yang ada di Kabupaten Jember sebagai berikut⁴¹:

Tabel 4.2

Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru sesuai jenjang

Sekolah	Murid	Guru
SLTA: 348	94388	5673
SLTP: 568	107302	7915
SD: 1445	224414	14231

Sumber: Kab. Jember dalam angka, BPS Kab. Jember

Semakin naik jenjang pendidikan, jumlah sekolah, murid, dan guru semakin menurun. Hal ini sejalan dengan tingkat partisipasi

⁴¹ Riski dan Arumita, *Indeks*, 46.

sekolah yang persentasenya semakin menurun pada kelompok usia sekolah yang lebih tinggi. Pada kelompok usia 16-18 tahun, tingkat partisipasi sekolah hanya sebesar 67,12 persen. Hal ini mengindikasikan mulai usia 13 tahun ke atas sudah mulai ada penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan, atau dengan kata lain mengalami putus sekolah. Tingkat ijazah yang dimiliki oleh penduduk Jember juga mencerminkan demikian, yaitu sebagian besar masih berpendidikan rendah. Berikut data yang peneliti peroleh

1. 7-12 mencapai 99,73
2. 13-15 mencapai 96,95
3. 16-18 mencapai 67,12

Dan berikut juga data anak yang berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan:

1. Tidak punya Ijazah SD/ 25,60 persen
2. SD sederajat/ 27,33
3. SMP sederajat/ 18,81
4. SMA keatas/ 28,25⁴²

Data keseluruhan tentang pencapaian pendidikan dan tingkat keterampilan penduduk diberikan oleh rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah (rata-rata tahun yang dihabiskan di sekolah); berangkat dari dua nilai tentang *mean of years* dan *expected years of schooling*. Terlihat perbedaan yang cukup jauh antara harapan lama

⁴² Riski dan Arumita, *Indeks*, 48.

sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Jember. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki Jember cukup tinggi, yaitu harapan lama sekolah mencapai 13,42 tahun atau setara dengan jenjang perkuliahan. Namun pada kenyataannya rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk sebesar 6,48 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 1. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Jember jika ingin meningkatkan kualitas manusianya. Salah satunya dengan menangani penduduk putus sekolah agar dapat tertampung dalam program paket yang nantinya jika lulus akan memperoleh ijazah yang setara.

Indeks pendidikan Kabupaten Jember senantiasa mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga 2020. Pada 2020, indeks pendidikan mencapai 0,59 dari skala 0 sampai 1. Pemerintah Jember menyadari bahwa hanya dengan penduduk berpendidikan tinggi, maka Jember akan menjadi daerah yang makmur dan madani. Oleh karena itu, Pemerintah Jember dalam meningkatkan pelayanan pendidikan berupaya meningkatkan program pengembangan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah hingga pelosok⁴³.

Empat puluh persen angka dari presentase pendidikan dari ketiga faktor terbesar penunjang kemajuan Indeks Pembangunan Manusia namun malah pendidikan masih sangat kurang di wilayah Jember, terbukti dari angka pemuda memiliki ijazah, harapan lama

⁴³ Riski dan Arumita, *Indeks*, 49.

sekolah, dan ijazah terakhir yang dimiliki ini masih sangat kurang untuk menjadikan masyarakat yang berkualitas tinggi. Pendidikan harusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah Jember bagaimana mengatasi angka minat belajar, minat sekolah, dan minat baca, ketika semua persoalan di wilayah pendidikan bisa teratasi maka semuanya akan lebih mudah di atasi golnya adalah masyarakat yang berkualitas.

c. Kehidupan yang Layak

Kehidupan yang Layak Pembangunan manusia adalah proses untuk memperluas pilihan. Salah satu pilihan tersebut adalah untuk dapat hidup dengan layak dan hidup yang sesuai dengan pilihannya. Dalam bidang pekerjaan misalnya, seseorang ingin mempunyai kemampuan untuk memilih bekerja di lingkungan pemerintahan atau swasta; untuk tempat tinggal bisa memilih di dalam kota yang lebih dekat dengan kantor atau di pinggir kota yang lebih nyaman; untuk transportasi mampu memilih dengan mobil sendiri, atau angkutan umum, dan pilihan berbagai segi kehidupan lainnya.⁴⁴

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa hakikat dari kesejahteraan manusia itu terletak pada kemampuan juga kebebasan dalam memilih. Dalam konteks inilah, pendapatan sebagai pendekatan dari tingkat hidup yang layak, dipilih sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Tetapi seringkali data indikator pendapatan ini sangat sulit didapatkan karena seringkali under estimate sehingga

⁴⁴ Riski dan Arumita, *Indeks*, 53.

diperlukan sebuah indikator lainnya yang dapat mendekati indikator pendapatan ini. Di dalam penghitungan IPM, digunakan indikator Pengeluaran per Kapita disesuaikan (*Purchasing Power Parity*) untuk mendekati indikator pendapatan.⁴⁵

Tabel 4.3
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Jember 2016-2021

2016	8.409
2017	8.698
2018	9.009
2019	9.525
2020	9.294
2021	9.410

Sumber: BPS Kab. Jember

Tidak sama dengan beberapa tahun sebelumnya, nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini terlihat seperti pada Grafik 12, pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebesar 9,525 juta rupiah dan turun menjadi 9,294 juta rupiah pada tahun 2020. Adapun untuk nilai PDRB, tercatat Kabupaten Jember memperoleh nilai sebesar 76.039,98 miliar rupiah dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,98 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian di Kabupaten Jember. Tanpa pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia tidak dapat berlanjut. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat berlanjut tanpa pembangunan manusia.

⁴⁵ Riski dan Arumita, *Indeks*, 54.

Kebijakan yang proaktif diperlukan untuk memperkuat hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia tersebut.

Kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tercermin dari indeks pengeluaran (*purchasing power parity*) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Indeks ini disajikan dalam bentuk pengeluaran perkapita per tahun yang telah disesuaikan. Indeks pengeluaran berkisar pada skala 0 sampai 1. Indeks pengeluaran di Kabupaten Jember pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 0,69 menjadi 0,68.

Berikut wawancara yang peneliti lakukan terhadap pegawai BPS Kabupaten Jember sebagai berikut:

Adinda Qornelica, STT. Jabatan: Statistik Fungsional Umum

“Pengumpulan data yang kami peroleh melalui sensus lapangan yang berkenaan dengan Indeks Pembangunan Manusia dinilai dari beberapa aspek yaitu tumbuh kembang ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan sensus lapangan namun pada poin penyimpulan kami tidak menyimpulkan secara mendetail dikarenakan kami hanya pada poin pengumpulan data di lapangan, untuk lebih jelasnya mas bisa membuka laman BPS cabang Jember itu sendiri karena semua data susa kami sediakan disana.”⁴⁶

Berbicara Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Jawa timur, Jember salah satu Indeks Pembangunan Manusia yang secara persenan masih ada di No tiga paling bawah ketika berbicara jawa

⁴⁶ Adinda Qornelia, Wawancara(24 November 2022)

timur, ini bukti bahwa masyarakat jember ketimpangan masih sangat besar senga angka persen indek jember masih berada di dataran bawah ketika dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Mengapa bisa demikian padahal Jember salah satu Kabupaten yang secara angka kemajuan ada di urutan atas sebagai Kabupaten percontohan karena klaim sebagai kabupaten maju yang berada di jawa timur, sebut saja kampus di Jawa timur yang banyak dan yang masuk kategori ada kampus-kampus ternama Jember berada di urutan ketiga, yang seharusnya ini menjadi nilai lebih untuk pemerintah Jember bisa memanfaatkan peluang ini.

Dan berikut salah satu sampel kecamatan yang dapat kami wawancarai:

Kecamatan Tempurejo memiliki delapan Desa yaitu Wonosari, Tempurejo, Sanenrejo, Sidodadi, Pondokrejo, Curahtakir, Andungrejo, Curahnongko alah satu dari beberapa Kecamatan di Jember dan juga salah satu dari tiga Kecamatan yang menjadi tujuan untuk mencari data yang kami himpun bahwa di Kecamatan Tempurejo memiliki beberapa temuan dari dua orang yang kami wawancarai satu dari pegawai kecamatan dan warga kecamatan Tempurejo.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Raoda, selaku pejabat Kecamatan Tempurejo Jember bagian perancangan sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan untuk kecamatan tempurejo ini leee... pelayanan program minat pendidikan dan kesehatan yang lebih diutamakan dibuktikan bahwa kami menerima anak magang dari SMK-SMA di kecamatan, ini merupakan bentuk perhatian kami terkait pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di Kecamatan Tempurejo”⁴⁷

Kecamatan saya rasa ikut andil untuk bisa memajukan masyarakatnya melalui pengondisian kepala desa setempat untuk mengurus masing-masing masyarakatnya karena memang tugas eksekutif terbawah terletak pada kepala desa, ketika semua program berjalan dengan baik dan dinamis maka disinilah terciptanya masyarakat yang berkualitas.

Ahamad Faisol, guru TPQ di Desa Andungrejo Kecamatan Tempurejo sebagai berikut:

“Kalo berbicara Pendidikan tidak hanya banyak lulusan SD namun juga banyak masyarakat yang bahkan SD saja tidak lulus sehingga dari hal ini masih banyak masyarakat yang menganggur dan masih bisa dikatakan tidak adaptif dalam menghadapi tantangan zaman”⁴⁸

Dari hasil wawancara di kecamatan tempurejo dapat disimpulkan sedikit bahwa masyarakat Jember yang berada di wilayah pinggir masih sangat sulit untuk bisa memahami bahwa pendidikan itu sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang layak sehingga dengan begitu dapat mengurangi angka pengangguran.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

⁴⁷ Raoda, *Wawancara (29 November)*

⁴⁸ Ahmad Faisol, *Wawancara (30 November 2022)*

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami

perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Wawancara yang kami lakukan kepada defki pegawai tidak tetap BPS:

“Di jember ini masih banyak kecamatan yang secara fasilitas umum masih terbilang kurang untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kabupaten yang maju ada ketimpngan yang lumayan jauh dari yang kecamatan kota sehingga kualitas masyarakat yang hidup di bagian kecamatan pinggiran tidak sama dengan masyarakat yang hidup di kecamatan yang dekat dengan pusat kabupaten, dari mulai kualitas hidup, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan atau hidup sehat”⁴⁹

Sesuai yang disampaikan pewawancara bahwa memang masih dalam tahap proses pembangunan untuk wilayah-wilayah terpinggir, namun sejauh mana pengobtimalan kinerja pemerintah

⁴⁹ Defki, *Wawacara*, (26 November)

mengembangkan kecamatan-kecamatan terpinggir ini agar paling tidak sedikit menyamai kecamatan yang letaknya dengan pusat Kabupaten. Ketika program berjalan dinamis maka tak ada lagi bahasa kami kesulitan akses.

Wawancara kepada bapak Pungki selaku pegawai tidak tetap BPS:

“Kalo berbicara indikator dari Indeks Pembangunan Manusia ini mas maka dari ketiga faktor tersebut secara data BPS sudah lumayan lengkap lah namun kan kembali lagi pada yang bisa mengelola data tersebut mas kalo BPS kan hanya pada poin ngumpul data tersebut untuk pengelolaan kembali pada pemereintah mas namun memang ketika berbicara hal ini saya rasa masih sangat lamban untuk penangannya mas”⁵⁰

Indikator yang dibahas sangat relevan bagi kenyamanan dan keberlangsungan pola pikir yang baik dan taraf hidup yang layak, kelayakan hidup ini menjadi titik akhir pencapaian yang diinginkan bersama.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari temuan lapangan, penyajian, dan opini analisis di atas, dan kemudian kami tindak lanjuti ke jenjang berikutnya pada pembahasan penjas dari penafsiran secara mendalam berkenaan dengan fokus penelitian. Berikut hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti dapatkan dan kerjakan maka berikut ini penjelasannya.

⁵⁰ Pungki, *Wawancara*, (28 November)

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai dengan data yang kami samapaikan di sub bab sebelumnya maka kami menemukan bahwa secara garis besar Pemerintah masih kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemangku kebijakan padahal sudah ada Pengelolaan data dari BPS yang seharusnya menjadi acuan untuk pemerintah dapat meningkatkan kompetensi dari berbagai aspek yang diperlukan masyarakat untuk menujung Indeks Pembangunan Manusia tersebut. Sebab dari beberapa yang di teliti oleh peneliti melalui data yang di sediakan BPS masih banyak angka-angka minus ketika berbicara penduduk keseluruhan masyarakat jember khususnya, temuan yang kami dapat ketika melihat beberapa presentase yang ada hampir dari ketiga aspek penunjang kemajuan IPM-nya masih sisa 30 persen sampai 40 persen.

Secara umum program pemerintah sudah mencapai angka 60, sekian persen bisa dikatan sukses tetapi tidak bisa dikatakan sukses juga ketika data tersebut disandingkan seperti data angka pendidikan yang masih lumayan kurang begitu pula dengan kesehatan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Seperti halnya angka lama belajar yang presentase terbesarnya adalah anak atau masyarakat yang hanya lulus SD, ketika sudah berbicara pendidikan yang masih minim maka akan berimbas pada angka pengangguran yang semakin besar.

Bahkan peneliti telah menyinggung hal ini pada konteks penelitian di awal ada angka sebesar 63 ribu masyarakat Jember yang masih belum bekerja atau menganggur dan ini sesuai dengan angka presentase ketika digabungkan dari ketiga aspek tersebut, poinnya adalah Indeks Pembangunan Manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Ketika ketiga faktor tersebut di tangani secara rinci dan hati-hati serta memang dimaksimalkan maka akan tercapai data IPM Kabupaten Jember akan jauh lebih baik lagi.

2. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Sesuai dengan Undang Undang NO 23 Tahun 2014 pasal 258 pada poin ini tersampaikan bahwa pemerintah wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap pemerataan pendapatan perkapita masyarakat, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat.⁵¹

Potret yang kurang dari Indeks pembangunan manusia ini, masih lumayan jauh untuk sampai pada tahap masyarakat yang berkualitas terbukti dari tiga puluh delapan kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur ini ketika berbicara Indeks Pembangunan Manusia Jember masih ada di nomor tiga paling bawah dengan nilai pembangunannya 67,97 kinerja yang masih kurang ini harus lebih di perhatikan, karena dengan

⁵¹ Undang-Undang NO 23 Tahun 2014

perbaikan di wilayah Indeks Pembangunan Manusia ini maka wajah Jember akan berubah menjadi lebih baik lagi.

Sedikit tersampaikan melalui poin pertama terkait Indeks Pembangunan Manusia di Jember bahwa temuan yang berhasil kita dapatkan adalah IPM masyarakat Jember masih sangat lamban perkembangannya lebih jauh kami bahas secara terperinci sebagai berikut:

a. Kesehatan

Kesehatan masyarakat bukan hanya berbicara atau berteori tentang penyakit penyebarannya (epidemiologi), tentang gizi makana, tentang kesehatan lingkungan, tentang ilmu perilaku dan pendidikan, tetapi juga bagaimana aplikasi atau penerapan teori-teori tersebut dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat melalui pemberantasan penyakit, perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan gizi peningkatan perilaku masyarakat terhadap kesehatan didasarkan pada teori-teori tentang kesehatan masyarakat.⁵²

Maka sejatinya kesehatan adalah faktor yang sangat mendukung dengan tumbuh kembangnya pola pikir masyarakat, semakin banyak masyarakat mendapatkan kesehatan yang layak maka semakin besar pula angka sadar masyarakat tentang kehidupan yang layak sehingga hal ini berpengaruh pada Indeks Pembangunan manusianya itu sendiri.

⁵² Soekidjo Notoajmodjo, *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni* (Purbalingga: Rineka cipta, 2022), 1.

Seperti ungkapan dalam tubuh yang sehat terdapat pula otak yang cerdas begitulah kira-kira, sehingga menjadi sangat penting untuk menunjang gerak aktivitas yang lebih produktif ketika angka kesehatan semakin membaik dari sini perlu adanya bentuk perhatian yang lebih bagi Pemerintah Kabupaten Jember.

Jadi kesehatan dan akses mendapat perawatan yang baik tak hanya bagi yang memiliki uang banyak saja namun juga yang kurang mampu di ekonomi harusnya mendapatkan kesehatan yang sama, darimana hal ini terjadi tentunya atas program pemerintah,

b. Pendidikan

Keberadaan pendidikan sebagai hakikat kebutuhan hidup masyarakat penting dipelajari dan diamalkan. Manusia yang hidup mesti melihat pendidikan sebagai kompas kehidupan. Tanpanya, manusia dapat terjerembab ke dalam disorientasi dan kemunduran peradaban. Dan karena itu, negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan bermutu bagi bangsanya.⁵³

Tak hanya menjadi ungkapan bahwa pendidikan itu sangat penting dalam mengarungi perkembangan zaman, namun setiap lini kehidupan maka perlu berdampingan dengan pendidikan sehingga menciptakan lingkungan yang layak untuk generasi selanjutnya, seperti temuan data tersebut masih sangat banyak angka minat atau melek pendidikan yang kurang diminati bagi penerus ataupun yang sudah lanjut usia, seakan-

⁵³ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Bumi askara, 2015)

akan bahwa pendidikan masih belum berpengaruh pada berkembangnya zaman. Terbuti dari data yang di dapat oleh peneliti Pendidikan di Kabupaten Jember dalam perencanaan program Pemerintah Kabupaten masih berjalan merangkak, artinya sangat lambat sekali sedangkan perkembangan zaman sangat cepat berlalu.

Adanya keragaman dan kesamaan akses untuk mendapatkan pendidikan yang setara, artinya diwilayah-wilayah terbelakang mendapatkan pelayanan yang sama terkait pendidikan maka dengan begitu kualitas pendidikan akan lebih baik dan akan meningkatkan taraf kualitas masyarakat. Ketika pendidikan sudah mencapai puncak terbaiknya maka pengetahuan masyarakat terkait keterbukaan berfikir sangat menunjang kepada ketersediaannya lapangan pekerjaan, tak perlu memakai tenaga luar kabupaten Jember dengan masyarakatnya sendiri pun mampu mencapai itu.

c. Kehidupan yang layak

Standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu satu bulan disebut kebutuhan hidup layak (KHL). Gubernur menetapkan upah minimum regional berdasarkan KHL, dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta menjadi acuan mendasar dia hidup.

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang menentukan berhasil tidaknya suatu program pembangunan dengan mempersiapkan

pelaksanaannya dan menentukan berhasil atau tidaknya masyarakat. Selain fungsi manajemen lainnya (pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi), perencanaan adalah yang pertama dari empat fungsi yang sangat mendesak. Keberhasilan suatu kegiatan dapat diperkirakan akan terwujud apabila perencanaan suatu program atau kegiatan disusun dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, didukung dengan tersedianya data yang lengkap dan informasi yang bersumber dari hasil informasi dari berbagai pihak/stakeholder terkait, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek, dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁵⁴

Kehidupan yang layak akan di dapat melalui perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Jember itu sendiri dari mulai pendidikan yang mudah di akses serta biaya pendidikan yang relatif terjangkau juga tak lupa kesehatan yang sangat penting untuk menunjang aktivitas tersebut, ketika beberapa hal itu sudah mulai sangat diperhatikan maka pencapaian hidup yang layak bisa di rasyakan oleh seluruh masyarakat Jember itu sendiri.

⁵⁴ Hendrawati Hamid, *Managemen Pemberdayaan Masyarakat*, (SULSEL: De La Macca) Hal 73.

Wawancara dengan Ahmad Faisol selaku masyarakat di kecamatan

Tempurejo

“Kehidupan yang layak perlu dipertanyakan disini karena memang ada beberapa tanah yang masih saling klaim antara perkebunan dan warga, ada bahasa tanah ini milik perkebunan namun juga sudah banyak tanah yang diperjual belikan oleh masyarakat, memang ada beberapa tanah yang tak ada sertifikatnya mas.”

Mungkin hal ini cukup jelas membuktikan bahwa berbicara hidup yang layak masih kurang secara fakta bahwa memang bisa jadi beberapa rumah secara legal formal tanahnya milik perkebunan namun kembali lagi masyarakat lah yang nempati dari dulu tanah itu, hal ini menjadi tolak ukur juga bahwa perlu adanya perhatian khusus.

Tak ada yang sempurna dalam sebuah kinerja namun usaha perlu dilakukan semaksimal mungkin untuk menemukan hasil yang terbaik dari yang diinginkan bersama sehingga dalam menyelesaikan program dan mengatasi masalah perlu adanya kesungguhan untuk terciptanya keinginan yang di harapkan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peranan pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemerintah masih kurang dirasakan oleh masyarakat Jember, kinerja wajib yang seharusnya lebih diutamakan untuk segera diperbaiki namun masih terbengkalai sehingga tidak ada perubahan dalam persoalan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Tiga hal tersebutlah yang harusnya diutamakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Peranan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Pemerintah kabupaten Jember dalam melaksanakan amanah Undang-Undang No 23 tahun 2014 masih sangat kurang di poin pengembangan manusia artinya berbicara pembangunan manusia ada beberapa faktor pendukung untuk menciptakan manusia berkualitas yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan kehidupan yang layak. Upaya Kabupaten Jember belum optimal .

B. Saran-Saran

Kesempurnaan tak ada dalam diri manusia tetapi untuk mencapai yang terbaik itu adalah tugas wajib manusia dan pemimpin, berbicara saran dari poin yang menjadi penelitian si peneliti

1. Kesehatan

Perlu adanya penyuluhan sesering mungkin terhadap masyarakat yang belum memahami secara mendetail tentang pentingnya hidup sehat dan jaminan kesehatan itu adalah salah satu faktor pendukung untuk kehidupan lebih baik dengan metode penyuluhan yang sering dilakukan dengan Dinas terkait beserta pola-pola yang di aplikasikan di wilayah masyarakat melalui pemahaman secara verbal dulu. Pada intinya masyarakat harus paham dulu kerangka teori dari apa itu sehat dan apa pentingnya hidup sehat setelah itu terserab menjadi pemahan maka program posyandu, poli lansia dll semakin ramai atau antusias masyarakat akan bertambah.

Berikut beberapa poin saran dari peneliti terkait kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma yang di tanggung pemerintah.
- b. Edukasikan bahwa kesehatan itu penting.
- c. Posyandu, poli lansia dll bikin semenarik mungkin.

2. Pendidikan

Disini poin terbesar dan inti dari angka pengangguran yang masih besar di Jember yang masih ada hingga kini dikarenakan pemahaman dari masyarakat masih sangat minim tentang pentingnya pendidikan, perlu adanya program unggulan yang melibatkan tenaga pendidik secara sukarela atau bahkan bekerja sama dengan beberapa instansi seperti halnya bekerja sama dengan Kampus-kampus yang ada di wilayah lingkungan Kabupaten Jember saya rasa hal ini akan sangat efektif ketika diterapkan oleh pemerintah Jember.

Mengapa harus kampus jawabannya yang pertama kampus ada ribuan mahasiswa yang juga butuh pengalaman terjun kelapangan sedangkan Kabupaten membutuhkan itu, yang kedua mahasiswa tak perlu di bayar sehingga anggaran tidak membengkak di wilayah penyuluh pendidikan, yang ketika adanya patron dari berbagai pihak bahwa Pemerintah Kabupaten Jember peduli terhadap masyarakatnya dan juga kepada Mahasiswa dan sivitas Akademik.

Beikut beberapa poin dari saran peneliti terkait pendidikan sebagai berikut:

- a. Sebisa mungkin memperbanyak seminar di tingkat desa.
- b. Adakan pelatihan untuk menunjang aktivitas.
- c. Kerjasama dengan seluruh kampus yang ada di Kabupaten Jember.
- d. Sesering mungkin ada penyuluhan tentang pentingnya pendidikan.

3. Kehidupan yang Layak

Poin ketiga ini akan tercapai ketika dua poin yang sebelumnya sudah mencapai taraf yang terbaik dari yang baik sehingga faktor kehidupan yang layak ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan yang mendukung. Taraf hidup yang layak menentukan kualitas dari penunjang kemampuan itu sendiri, maka perlu kerja samanya antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Rahmat. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004.
- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UM Pres, 2005.
- Alexander, Abe. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005.
- Andriansyah. *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisa*, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015.
- Bakir, R. Sutyo Bakir. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- HR., Syaukani. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, 2003.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqih Siyasa Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Pustaka*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1999.
- Notoajmodjo, Soekidj., *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni* (Rineka cipta)
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, UIN KHAS Jember.
- Slamet, Kadar Slamet. *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bandung: Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jember: STAIN JEMBER Press, 2014.
- Suwatno dan Juni Priyansa, Donni. *Managemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, cv, 2016.
- Syafiie, Inu Kencana Syafiie. *Menejemen Pemerintahan*, Jakarta: PT PERCA, 2007.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996.
- Triwiyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Bumi askara, 2015.
- Vita Zulfa, Meri. *Statistik Daerah Kabupaten Jember*, Jember: BPS, 2021
- Yusuf, Asep Warlan. *Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang Suatu Model Pendekatan Sistem*, Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Internet:

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>, diakses pada Rabu 12 Mei 2021

<https://lppi.unisayogya.ac.id/antara-agama-dan-budaya-dalam-persepektif-islam/>, diakses pada 10 Mei 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-~~3233~~ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

17 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Bapak Camat Tempurejo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hosnan
Nim : s20153017
Semester : 15
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-323\ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

17 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hosnan
Nim : s20153017
Semester : 15
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JEMBER**

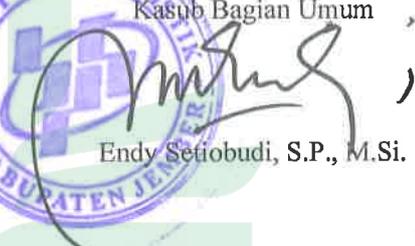
Nomor : B-35090.484/BPS/9280/11/2022
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permintaan data

Jember, 24 November 2022

Kepada Yang Terhormat :
Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di-
J E M B E R

Menindaklanjuti surat saudara No. B-3231/Un.22/4.a/PP.00.0/10/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan data tersebut telah diperoleh melalui website jemberkab.bps.go.id . dan data yang dimaksud telah terkumpulkan dan diperoleh dengan lengkap oleh Saudara Hosnan dengan NIM s20153017.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

A.n Kepala BPS Kabupaten Jember
Kasub Bagian Umum

Endy Setiobudi, S.P., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Hosnan
NIM : S20153017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam dalam hasil penelitian ininitidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang telah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang scara tertulis dkutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 28 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Hosnan

NIM: S20153017

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Hosnan
NIM : S20153017
Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 24 Maret 1997
Alamat : Dusun curahlempet, RT.17/RW.05, Desa Wonosari,
Kec.Wonosari, Kab. Bondowoso
Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Wonosari 2 (2005-2010)

MTS Al Anwar (2010-2013)

MA Al Anwar (2013-2015)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus pondok Pesantren Al Anwar (2013-2014)
2. Wakil Ketua Osis Mts Al Anwar (2011-2012)
3. Ketua Osis MA Al Anwar (2013-2013)
4. Pengurs HMPS Hukum Tata Negara (2016-2017)
5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (2017-2018)
6. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (2019-2020)